

ABSTRAK

Hila Lailatul Qodriyah, 1228010090, Implementasi Kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut

Pelaksanaan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR) di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak serta melindungi hak-hak anak, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, serta keterbatasan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan STOP KABUR oleh DPPKBPPPA Kabupaten Garut dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor-faktor utama dalam keberhasilan kebijakan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang menekankan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap variabel tersebut dipandang sebagai dimensi yang saling terkait dalam proses implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Informan penelitian terdiri dari pihak DPPKBPPPA Kabupaten Garut serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan STOP KABUR di Kabupaten Garut telah berjalan cukup baik, namun belum optimal secara menyeluruh. Komunikasi kebijakan telah dilakukan dengan cukup jelas namun belum merata, sumber daya dimanfaatkan dengan baik tetapi masih terbatas, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat, serta struktur birokrasi telah berjalan dengan adanya SOP dan koordinasi lintas sektor yang jelas meskipun masih memerlukan penguatan agar pelaksanaannya lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada dimensi pemerataan komunikasi dan dukungan sumber daya guna menunjang keberhasilan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, STOP KABUR, Pencegahan Perkawinan Anak, DPPKBPPPA Kabupaten Garut.